

Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Implementasi Program Edukasi Parlemen DPR RI sebagai Sarana Komunikasi Publik

DOI: <https://doi.org/10.32509/petanda.v7i3.5867>

Tedi Fathur Rahman*, Rialdo Rezky Manogari Lumban Toruan, Radja Erland Hamzah

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Jl. Hang Lengkir I No 8, Gelora, Jakarta Pusat, Indonesia

*Email Korespondensi: fathursekaadu12@gmail.com

Abstract – *Public Relations plays a strategic role in government institutions by fostering two-way communication between the organization and the public. The Public Relations Division of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) implements the Parliamentary Education Program as a means of public communication to enhance citizens' understanding of the duties, functions, authorities, and work mechanisms of the DPR RI. This study aims to analyze the implementation of the Parliamentary Education Program as a public communication strategy based on the Boundary Spanning Theory and Excellence Theory of James E. Grunig. The research employed a qualitative method with a constructivist approach through in-depth interviews with DPR RI Public Relations officials and program participants. The findings reveal that the program effectively serves as a medium of public education through an edutainment approach that combines interactive learning and direct observation. DPR RI's Public Relations acts as a communication facilitator that bridges the institution and the public through transparent, two-way communication, thereby improving the institution's image and reducing negative public perceptions. This implementation also strengthens DPR RI's Public Relations function as a public communication facilitator promoting transparency and accountability.*

Keywords: *DPR RI Public Relations; Parliamentary Education; Public Communication; Implementation; Institutional Image*

Abstrak – Public Relations memiliki peran strategis dalam pemerintahan untuk membangun komunikasi dua arah antara lembaga dan masyarakat. Humas DPR RI melaksanakan Program Edukasi Parlemen sebagai sarana komunikasi publik yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas, fungsi, wewenang, dan mekanisme kerja DPR RI. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program Edukasi Parlemen sebagai strategi komunikasi publik menggunakan teori *Boundary Spanning* dan *Excellence Public Relations* oleh James E. Grunig. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme melalui wawancara mendalam terhadap pejabat Humas DPR RI dan peserta program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini efektif sebagai media edukasi publik dengan pendekatan edutainment yang menggabungkan pembelajaran interaktif dan observasi langsung. Humas DPR RI berperan sebagai penghubung antara lembaga dan masyarakat melalui komunikasi dua arah yang transparan, sehingga mampu memperbaiki citra lembaga dan mengurangi persepsi negatif publik



terhadap DPR RI. Implementasi ini juga memperkuat fungsi Humas DPR RI sebagai fasilitator komunikasi publik berbasis transparansi dan akuntabilitas.

Kata Kunci: Humas DPR RI; Edukasi Parlemen; Komunikasi Publik; Implementasi; Citra Lembaga

Pendahuluan

Program Edukasi Parlemen merupakan inisiatif komunikasi publik yang dikembangkan oleh Humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan tujuan meningkatkan literasi politik masyarakat mengenai tugas, fungsi, wewenang, serta mekanisme kerja lembaga legislatif. Program ini menggunakan konsep *edutainment* (education plus entertainment) untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif melalui diskusi, simulasi, dan observasi langsung di lingkungan Gedung DPR RI, seperti Ruang Abdul Muis, Ruang Sidang Paripurna I, dan Museum DPR RI. Pendekatan ini dirancang agar peserta memperoleh pemahaman menyeluruh tentang sistem kerja parlemen melalui pengalaman langsung.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021, Bagian Humas dan Pengelolaan Museum memiliki tanggung jawab atas kegiatan promosi, penerimaan kunjungan publik, pengelolaan museum, serta penyelenggaraan kegiatan edukatif (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2016). Melalui program ini, Humas DPR RI berupaya memperkuat fungsi diseminasi informasi dan pendidikan publik yang menjadi bagian dari mandat lembaga.

Namun, tantangan utama yang dihadapi DPR RI adalah masih kuatnya persepsi negatif masyarakat terhadap lembaga legislatif. Sebagian publik menilai bahwa DPR RI lebih berorientasi pada kepentingan politik dan retorika dibandingkan pada pelayanan publik. Akibatnya, muncul sikap apatis dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat. Dalam konteks inilah, Humas DPR RI dituntut berperan aktif membangun komunikasi dua arah yang mampu mengubah persepsi publik melalui strategi komunikasi yang informatif, edukatif, dan partisipatif.

Hasil wawancara pra-penelitian dengan Leidena Sekar Negari, S.I.Kom., Ami.Pr., selaku Pranata Humas DPR RI, menunjukkan bahwa program ini awalnya hanya berupa kunjungan sekolah ke Museum DPR RI dan Ruang Paripurna. Dalam perkembangannya, program ini diperluas dengan penambahan sesi pemaparan materi tentang mekanisme kerja DPR RI secara lebih komprehensif. Menurut Leidena, perluasan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kinerja lembaga legislatif. Ia menjelaskan bahwa tujuan program bukan sekadar memperkenalkan fungsi DPR RI, tetapi juga meluruskan informasi yang keliru dan mengubah pandangan negatif masyarakat melalui edukasi langsung. Sejak masa pandemi COVID-19, Humas DPR RI menargetkan capaian partisipasi sebesar 3,5% dari populasi Indonesia, mengacu pada pandangan teoretis bahwa proporsi tersebut cukup untuk memicu perubahan sosial dalam masyarakat.

Program Edukasi Parlemen pada dasarnya merupakan bagian dari strategi komunikasi publik Humas DPR RI yang bertujuan memperbaiki citra lembaga melalui penyediaan informasi transparan dan pendidikan politik yang membangun kesadaran masyarakat. Dalam perspektif komunikasi pemerintahan, peran humas menjadi vital karena berkaitan langsung dengan pembentukan opini publik yang positif (*goodwill*) serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung kebijakan lembaga (Oktavia et al., 2021). Fungsi humas tidak hanya menyebarluaskan informasi, tetapi juga menjembatani hubungan antara lembaga dan publik untuk menciptakan pemahaman timbal balik yang konstruktif.

Menurut (Anthony, 2021), citra pemerintah merupakan isyarat simbolik yang dibentuk melalui proses komunikasi yang meyakinkan publik untuk mempercayai dan berempati terhadap lembaga. Sementara itu, Cutlip, Center, dan Broom mendefinisikan hubungan masyarakat sebagai fungsi manajerial yang berperan memelihara hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Dalam konteks ini, Humas DPR RI berfungsi sebagai mediator strategis yang mengatur arus komunikasi antara lembaga dan masyarakat agar tercipta persepsi positif terhadap lembaga legislatif.

Pelaksanaan Program Edukasi Parlemen juga merepresentasikan makna implementasi kebijakan dalam tataran praktis. Menurut (Rosad, 2019), implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan menjadi tindakan konkret yang melibatkan koordinasi antarunit dan penyesuaian birokratis agar tujuan organisasi tercapai. Senada dengan itu, Dunn dalam (Ulfatimah, 2020) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian keputusan yang saling terkait di lapangan untuk mewujudkan tujuan spesifik dengan mekanisme dan sumber daya tertentu. Dalam konteks penelitian ini, implementasi dimaknai sebagai upaya Humas DPR RI menerjemahkan kebijakan komunikasi lembaga menjadi aktivitas edukatif yang sistematis melalui *Program Edukasi Parlemen*.

Lebih jauh, fungsi komunikasi publik menjadi aspek penting yang menopang efektivitas implementasi program ini. Komunikasi publik dipahami sebagai proses penyampaian pesan antara individu atau kelompok kepada khalayak luas mengenai isu kebijakan, baik secara tatap muka maupun melalui media (Maida et al., 2025). Ahmed Kurnia Soeriawidjaja dalam (Ramadani, 2019) mendefinisikan komunikasi publik sebagai pengelolaan informasi publik yang mencakup perencanaan, penyiapan, dan pelaksanaan komunikasi terkait kebijakan pemerintah. Komunikasi publik yang baik tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga membuka saluran partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan. Dengan cara ini, kebijakan pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Amanda, 2020).

Dalam konteks lembaga legislatif, komunikasi publik menjadi sarana untuk memperkuat legitimasi dan membangun kepercayaan masyarakat. DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat perlu memahami bahwa kepercayaan publik merupakan modal utama dalam menjalankan fungsi representatifnya. Oleh karena itu, perpaduan antara strategi komunikasi publik dan pelayanan informasi menjadi kunci penting dalam memperkuat akuntabilitas serta transparansi lembaga.

Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan relevansi topik ini. (Lavenia, 2022) meneliti komunikasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam mensosialisasikan kehidupan *new normal* di Muara Dua, dan menemukan bahwa sosialisasi yang dilakukan meningkatkan disiplin masyarakat namun menghadapi hambatan dalam kesadaran publik. Sementara itu, (Aji, 2022) meneliti peran komunikasi publik dalam pencegahan penyakit demam berdarah di Puskesmas Mataram dan menemukan bahwa kegiatan penyuluhan berhasil mengubah perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi publik sangat bergantung pada metode pendekatan, media yang digunakan, serta keterlibatan masyarakat secara langsung.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini berfokus pada implementasi strategi komunikasi publik dalam konteks lembaga legislatif, yang relatif jarang diteliti. Melalui analisis terhadap *Program Edukasi Parlemen* DPR RI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memahami bagaimana praktik komunikasi publik pemerintah dijalankan untuk membangun citra positif lembaga dan meningkatkan partisipasi warga dalam sistem demokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Program Edukasi Parlemen* DPR RI sebagai sarana komunikasi publik dengan menggunakan pendekatan *Boundary Spanning Theory* dan *Excellence Public Relations Theory*. Kedua teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana peran Humas DPR RI dalam menjembatani hubungan lembaga dengan publik, serta bagaimana strategi komunikasi yang dijalankan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan citra positif lembaga legislatif di mata masyarakat.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivisme. Paradigma ini memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi pengalaman subjektif individu maupun kelompok, sehingga peneliti berupaya memahami makna yang dibentuk oleh informan dalam konteks sosial dan kelembagaan tertentu (Umanailo, 2019). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menggali secara mendalam proses implementasi *Program Edukasi Parlemen* yang dijalankan oleh Humas DPR RI sebagai sarana komunikasi publik (Umanailo, 2019).

Objek penelitian ini adalah pelaksanaan *Program Edukasi Parlemen* DPR RI yang dirancang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan mekanisme kerja lembaga legislatif. Subjek penelitian meliputi pejabat dan staf Humas DPR RI yang terlibat langsung dalam perencanaan serta pelaksanaan program, dan peserta kegiatan yang berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengalaman dan pemahaman yang relevan terhadap implementasi program tersebut.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam yang dilakukan secara terstruktur dengan panduan pertanyaan terbuka mencakup persepsi, pengalaman, dan evaluasi program dari sudut pandang informan. Wawancara dilakukan selama 45–60 menit dan direkam dengan persetujuan informan. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap kegiatan *Program Edukasi Parlemen* di lingkungan Kompleks DPR RI untuk memahami dinamika komunikasi yang terjadi antara pihak humas dan peserta. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen resmi, publikasi kegiatan, serta regulasi internal DPR RI yang berkaitan dengan fungsi edukasi publik.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Seluruh proses analisis dibantu oleh perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk melakukan *thematic coding*, sehingga hubungan antar tema dan pola komunikasi dapat diidentifikasi secara sistematis. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan dengan hasil observasi dan data dokumentasi. Validitas hasil penelitian juga diuji melalui prinsip *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* agar hasil temuan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Evelina, 2015).

Sebelum proses pengumpulan data dilakukan, peneliti terlebih dahulu memperoleh izin resmi dari pihak Humas DPR RI dan memberikan penjelasan kepada seluruh informan mengenai tujuan, manfaat, serta kerahasiaan identitas mereka. Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela, dan seluruh data yang dikumpulkan digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Edukasi Parlemen Berdasarkan Teori Boundary Spanning.

Program Edukasi Parlemen merupakan tanggung jawab Bagian Humas DPR RI melaksanakan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat umum, termasuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat. Program Edukasi Parlemen dibuat menggunakan pendekatan *edutainment*, yang menggabungkan aspek hiburan dan pendidikan untuk membuat kegiatan menarik dan mendorong peserta untuk berpartisipasi dalam proses belajar. Kegiatan termasuk diskusi, observasi, dan simulasi.

Cutlip & Center dalam (Erlangga, 2021) menyatakan bahwa konsep humas sebagai fungsi manajemen dengan tujuan untuk membentuk dan menjaga keharmonisan antara perusahaan dengan seluruh publiknya yang dapat mempengaruhi keberhasilan operasi suatu perusahaan. Pernyataan diatas sejalan dengan pelaksanaan program edukasi parlemen yang laksanakan humas DPR RI untuk merubah melakukan Edukasi kepada masyarakat pada Implementasi Program Edukasi Parlemen mengenai tugas, fungsi, wewenang dan mekanisme kinerja DPR RI.

Pernyataan diatas sejalan dengan implementasi program edukasi parlemen oleh Humas DPR RI merupakan program yang dibentuk agar publik tau tentang tugas, fungsi, wewenang dan kinerja DPR RI secara komprehensif, agar dapat mengedukasi masyarakat. Kerena humas DPR RI ingin mengedukasi masyarakat untuk mengtahui tugas, fungsi, wewenang dan mekanisme kinerja DPR RI sehingga publik mengtahui apa yang dilakukan DPR RI dan masyarakat merasa DPR RI ruang terbuka untuk dikunjungi.

Boundary Spanning dikemukakan oleh James D. Thompson. Dalam bukunya yang berjudul *Organizations in Action: Social Science Bases of Administrative Theory* (1967), Thompson mengidentifikasi pentingnya "boundary spanners" dalam mengelola hubungan antara organisasi dan lingkungannya. boundary spanning merupakan fungsi yang membantu berjalannya suatu sistem, Dalam sebuah organisasi boundary spanning merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan informasi tentang organisasi kepada publik.

Pernyataan teori diatas sejalan dengan implementasi Program Edukasi sebuah bentuk dari Humas DPR RI untuk menedukasi masyarakat mengenai tugas, fungsi, wewenang serta makanisme kinerja DPR RI kepada masyarakat. Ingin memperkenalkan kepada publik yaitu Museum DPR RI yang bisa dikatakan tidak banyak diketahui oleh publik dan Ruang Rapat Paripurna 1 merupakan sebuah rungan yang bersejarah serta ditambahkannya pemparan materi mengenai mekanisme kinerja DPR RI dengan harapan publik dapat paham tentang DPR RI. Kerena humas DPR RI ingin mengedukasi masyarakat untuk mengtahui tugas, fungsi, wewenang dan mekanisme kinerja DPR RI sehingga publik mengtahui apa yang dilakukan DPR RI dan masyarakat merasa DPR RI ruang terbuka untuk dikunjungi.

Tujuan dari teori boundary spanning adalah membangun sistem komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik. Hal ini akan membuat publik tidak merasa dikucilkan dan meminimalisir tindakan-tindakan publik yang akan merugikan organisasi. Komunikasi dua arah akan mempermudah organisasi dalam membuat suatu keputusan agar dapat mewadahi keinginan dan kebutuhan publiknya. Dapat dikatakan boundary spanning juga sangat bermanfaat di ranah kegiatan pemerintahan (Rahmadanty, 2019).

Pernyataan teori diatas sejalan dengan tujuan implementasi program Edukasi parlemen sebagai sarana bagi humas DPR RI untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan DPR RI untuk menjelaskan tugas, fungsi, wewenang serta makanisme kinerja DPR RI kepada masyarakat yaitu untuk menciptakan masyarakat indonesia yang paham dengan demokrasi

dan parlemen. Dan mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai DPR atau keparlemenan secara benar. Kerena humas DPR RI ingin mengedukasi masyarakat untuk mengetahui tugas, fungsi, wewenang dan mekanisme kinerja DPR RI sehingga publik mengtahui apa yang dilakukan DPR RI.

Kriyantono (Kriyanto, 2014) menyebutkan beberapa aktivitas pelaksanaan fungsi boundary spanning yang dapat dilakukan oleh praktisi public relations, yaitu, Menjelaskan informasi tentang organisasi kepada publik (lingkungannya), memonitor lingkungannya sehingga mengetahui apa yang terjadi dan menginterpretasi isu-isu yang potensial memengaruhi aktivitas organisasi dan membantu manajemen merespon isu-isu tersebut melalui aktivitas isu manajemen, membangun sistem komunikasi dua arah dengan publiknya agar organisasi dapat beradaptasi dengan lingkungannya.

Hal tersebut sejalan pada implementasi program Edukasi Parlemen dimana program ini sebagai sarana yang digunakan Humas DPR RI untuk menyampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan DPR RI. Program Edukasi Parlemen juga sebagai sarana bagi Humas DPR RI untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas, fungsi, wewenang dan mekanisme kinerja DPR RI, program edukasi parlemen juga melakukan komunikasi dua arah kepada masyarakat dan humas DPR RI juga menggunakan teknik komunikasi yang sesuai dengan masyarakat dalam menyampaikan informasi sehingga bisa tersampaikan dengan baik. Kerena humas DPR RI ingin mengedukasi masyarakat untuk mengetahui tugas, fungsi, wewenang dan mekanisme kinerja DPR RI sehingga publik mengtahui apa yang dilakukan DPR RI dan masyarakat merasa DPR RI ruang terbuka untuk dikunjungi.

Usman dalam (Rosad, 2019) menyebutkan bahwa implementasi merupakan hasil dari sebuah aktivitas atau mekanisme sistem. Implementasi tidak hanya sebatas aktivitas, melainkan sebuah kegiatan yang telah direncanakan dengan cermat untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, implementasi mencakup kegiatan yang telah direncanakan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi dipengaruhi oleh berbagai objek dan tidak bisa berdiri sendiri.

Pernyataan diatas sejalan dengan apa yang dilakukan humas DPR RI pada implelentasi program edukasi parlemen. Karena program edukasi parlemen sebagai sarana bagi humas DPR RI agar masyarakat mengtahui tugas, fungsi, wewenang dan mekanisme kinerja DPR RI secara komprehensif agar dapat merubah presepsi negatif dan meningkatkan citra dari masyarakat. pada implementasi program edukasi parlemen ini dilaksanakan mulai dari masyarakat melakukan permohonan untuk mengikuti program ini dengan cara bersurat ke Humas DPR RI, kemudian humas DPR RI mengatur penjadwalan dan mengkonfirmasikan ke pemohon tanggal kegiatan, selanjutnya humas DPR RI melakukan koordinasi internal mengenai persiapan kegiatan edukasi parlemen, setelah itu humas DPR RI menerima tamu kunjungan kegiatannya meliputi berfoto bersama di depan gedung paripurna 1, dilanjutkan pemaparan materi dari humas DPR RI, dilanjutkan berkunjung ke museum DPR RI untuk mengtahui sejarah terbentuknya DPR RI dari zaman Belanda hingga saat ini dan Ruang paripurna 1 untuk mengtahui sejarah dari bangunan tersebut. Dan yang terakhir humas DPR RI selalu mempublikasikan kegiatan edukasi parlemen ini ke media sosial yang mereka miliki dengan tujuan bahwa DPR RI terbuka lebar untuk dikunjungi oleh masyarakat dan ingin menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui media sosial dikarenakan media sosial tidak terbatas ruang dan waktu untuk diakses. Humas DPR RI melakukan pendekatan-pendekatan pada implementasi program Edukasi Parlemen. Kerena humas DPR RI ingin mengedukasi masyarakat untuk mengetahui tugas, fungsi, wewenang dan mekanisme kinerja

DPR RI sehingga publik mengtahui apa yang dilakukan DPR RI dan masyarakat merasa DPR RI ruang terbuka untuk dikunjungi

Impelementasi Program edukasi Parlemen Berdasarkan Teori Excellence.

Implementasi program edukasi yang dilaksanakan oleh Humas DPR RI bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan mekanisme kerja DPR RI. Program ini dirancang sebagai bentuk tanggung jawab Humas DPR RI dalam membangun pemahaman publik, mereduksi kesalahpahaman yang mungkin muncul, serta mengedukasi masyarakat secara berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh gambaran komprehensif mengenai kinerja lembaga legislatif dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Teori *Excellence*, yang dikemukakan oleh James E. Grunig dan koleganya pada tahun 1984, menjadi landasan penting dalam merancang program edukasi ini. Teori ini merupakan salah satu tonggak utama dalam kajian komunikasi organisasi dan hubungan masyarakat (*public relations*). Inti dari teori ini adalah bahwa Humas harus berperan secara strategis dalam manajemen organisasi, membantu pencapaian tujuan organisasi, dan meningkatkan efektivitasnya (Saputra & Marta, 2020). Dalam konteks DPR RI, teori ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif untuk menjembatani kepentingan lembaga legislatif dan publik.

Penerapan Teori *Excellence* pada program edukasi parlemen tercermin dalam upaya Humas DPR RI menyampaikan informasi yang jelas, akurat, dan relevan terkait proses legislasi. Masyarakat diajak untuk memahami alur kerja DPR RI, termasuk mekanisme pembentukan undang-undang, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Hal ini bukan sekadar transfer informasi, tetapi juga pengelolaan pesan yang bertujuan membentuk pemahaman publik secara utuh. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan DPR RI, tetapi juga memahami alasan di balik setiap kebijakan.

Grunig dan Hunt (Ashari & Arsyad, 2023) menjelaskan bahwa interaksi antara praktisi Humas dan publiknya dapat digambarkan melalui beberapa model komunikasi *public relations*. Salah satunya adalah *Press Agentry/Publicity Model*, yang berfokus pada promosi dan publisitas untuk membangun citra positif organisasi. Model ini sering digunakan untuk menciptakan perhatian publik terhadap kegiatan organisasi melalui berbagai teknik persuasi dan kampanye komunikasi. Dalam konteks edukasi parlemen, pendekatan ini dapat dilihat dari upaya Humas DPR RI mengemas informasi tentang lembaga legislatif dengan menarik, mudah dipahami, dan relevan bagi khalayak luas.

Penggunaan *Press Agentry/Publicity Model* pada program edukasi parlemen terlihat dalam strategi publikasi dan promosi kegiatan DPR RI melalui berbagai kanal komunikasi. Humas DPR RI memanfaatkan media sosial, laman resmi, dan siaran pers untuk menarik perhatian publik. Tujuannya adalah menciptakan kesadaran awal (*awareness*) yang mendorong masyarakat untuk mencari tahu lebih banyak mengenai peran DPR RI. Pendekatan ini efektif dalam menjangkau masyarakat luas, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan media digital.

Model kedua yang relevan adalah *Two-Way Asymmetrical Model*. Dalam model ini, publik dipandang sebagai objek yang perlu dipelajari untuk memahami kebutuhan dan persepsi mereka sebelum menyampaikan pesan. Meskipun komunikasi dilakukan dua arah, model ini lebih menekankan pada penyesuaian publik terhadap kepentingan organisasi. Umpan balik dari publik digunakan untuk menyusun pesan yang persuasif dan mendorong publik bertindak sesuai harapan

organisasi. Pendekatan ini banyak digunakan ketika organisasi ingin membentuk perilaku atau opini publik secara terarah.

Implementasi *Two-Way Asymmetrical Model* pada program edukasi parlemen dilakukan melalui kegiatan tatap muka seperti seminar, diskusi publik, dan kunjungan masyarakat ke Gedung DPR RI. Dalam kegiatan ini, Humas DPR RI menerima masukan dari peserta, namun fokus utamanya tetap pada penyampaian pesan utama: mengenalkan tugas, fungsi, wewenang, dan mekanisme kerja DPR RI. Strategi ini bertujuan membangun persepsi positif dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap lembaga legislatif.

Selain itu, interaksi langsung antara Humas DPR RI dan masyarakat membuka ruang terjadinya *engagement* yang lebih personal. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga merasa dilibatkan dalam proses komunikasi. Umpulan yang diperoleh dapat digunakan untuk memperbaiki metode penyampaian materi dan menyesuaikan konten agar lebih sesuai dengan kebutuhan audiens. Hal ini sejalan dengan prinsip Teori *Excellence* yang menempatkan komunikasi sebagai proses dinamis dan adaptif.

Keberhasilan implementasi program edukasi parlemen juga bergantung pada kemampuan Humas DPR RI mengintegrasikan berbagai model komunikasi secara strategis. Meskipun *Press Agentry* efektif dalam menarik perhatian, dan *Two-Way Asymmetrical* berguna untuk membentuk persepsi publik, keduanya perlu dipadukan dengan elemen transparansi dan akuntabilitas. Hal ini penting agar komunikasi yang dilakukan tidak hanya persuasif, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang.

Dalam pelaksanaannya, program edukasi parlemen memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk media massa, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan pesan dan meningkatkan kredibilitas program. Media berperan sebagai saluran distribusi informasi, akademisi dapat memberikan perspektif ilmiah, dan organisasi masyarakat sipil membantu menghubungkan pesan dengan konteks lokal. Sinergi ini memperkuat posisi Humas DPR RI sebagai penghubung antara lembaga legislatif dan masyarakat.

Terakhir, penting untuk menekankan bahwa keberlanjutan program edukasi parlemen memerlukan evaluasi berkala. Evaluasi ini meliputi penilaian efektivitas strategi komunikasi, tingkat pemahaman publik, dan perubahan persepsi terhadap DPR RI. Dengan melakukan evaluasi secara sistematis, Humas DPR RI dapat menyesuaikan pendekatan komunikasi agar tetap relevan dengan dinamika sosial-politik dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan esensi Teori *Excellence*, yaitu menempatkan komunikasi sebagai fungsi manajerial yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi sekaligus memenuhi kepentingan publik.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Program Edukasi Parlemen* oleh Humas DPR RI merepresentasikan praktik komunikasi publik yang sejalan dengan prinsip *Boundary Spanning* dan *Excellence Public Relations Theory*. Dalam perspektif *Boundary Spanning*, Humas DPR RI berperan sebagai jembatan antara lembaga legislatif dengan masyarakat melalui kegiatan edukatif dan interaktif. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat memahami peran DPR RI secara lebih terbuka. Temuan ini memperkuat pandangan Thompson (1967) bahwa *boundary spanners* berperan penting dalam menjembatani hubungan organisasi dengan lingkungannya agar tercipta sistem komunikasi yang adaptif dan inklusif.

Peran strategis Humas DPR RI juga terlihat dalam bagaimana lembaga tersebut melakukan pengelolaan isu dan penyampaian pesan publik. Aktivitas utama seorang *boundary spanner* mencakup pemantauan isu publik, penyebaran informasi strategis, dan pembentukan komunikasi dua arah untuk menjaga keseimbangan hubungan antara organisasi dan publik (Kriyanto, 2014). Aktivitas tersebut terefleksi dalam cara Humas DPR RI merancang *Program Edukasi Parlemen* dengan menggabungkan elemen edukasi dan hiburan (*edutainment*) agar lebih efektif menarik perhatian publik dan membangun keterlibatan masyarakat.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian (Oktavia et al., 2021) yang menyatakan bahwa humas pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk opini publik yang positif terhadap kebijakan dan program pemerintah. *Program Edukasi Parlemen* menunjukkan fungsi serupa dengan memperlihatkan upaya Humas DPR RI dalam memperbaiki citra lembaga melalui diseminasi informasi yang transparan dan berbasis dialog publik. Keberhasilan program ini dalam membangun persepsi positif publik menjadi bukti bahwa komunikasi dua arah mampu meminimalkan jarak sosial antara lembaga legislatif dan masyarakat.

Dari perspektif *Excellence Theory*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Humas DPR RI berhasil menerapkan prinsip komunikasi simetris yang menjadi inti teori tersebut. Grunig dan Hunt dalam (Ashari & Arsyad, 2023) menyebutkan bahwa komunikasi dua arah yang simetris mampu meningkatkan efektivitas organisasi dengan menyesuaikan pesan terhadap kebutuhan dan harapan publik. Dalam konteks *Program Edukasi Parlemen*, komunikasi dilakukan tidak hanya sebagai penyampaian informasi top-down, tetapi juga melibatkan umpan balik dari peserta yang kemudian dijadikan dasar evaluasi kegiatan berikutnya. Pendekatan ini menandai penerapan fungsi humas yang strategis dan partisipatif, sebagaimana ditekankan dalam penelitian (Saputra & Marta, 2020) yang menunjukkan pentingnya kolaborasi antara lembaga dan publik dalam pembentukan citra yang kredibel.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini memperkuat hasil penelitian (Lavenia, 2022) yang menyoroti efektivitas komunikasi publik dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di tingkat daerah. Walaupun konteks penelitian Lavenia berbeda yakni sosialisasi *new normal* keduanya memiliki kesamaan dalam hal bagaimana komunikasi publik digunakan sebagai sarana untuk mengubah perilaku dan pandangan masyarakat. Perbedaannya terletak pada pendekatan: *Program Edukasi Parlemen* menonjolkan interaksi langsung dan edukasi berbasis pengalaman, sementara penelitian Lavenia menitikberatkan pada penyebaran pesan melalui kanal media konvensional.

Hasil penelitian ini juga memiliki kemiripan dengan penelitian (Aji, 2022) tentang komunikasi publik di Puskesmas Mataram. Aji menegaskan bahwa komunikasi langsung melalui penyuluhan efektif dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu kesehatan. Hal ini relevan dengan temuan penelitian ini, di mana interaksi langsung antara Humas DPR RI dan peserta program memperkuat efektivitas penyampaian pesan dan menciptakan rasa kedekatan antara lembaga dan publik. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi tatap muka yang dikombinasikan dengan media digital merupakan strategi yang efektif untuk membangun kepercayaan publik.

Selain itu, temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan (Ramadani, 2019) bahwa komunikasi publik yang baik tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan pengendalian arus informasi melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis. Dalam hal ini, Humas DPR RI menunjukkan kemampuan untuk mengelola komunikasi

publik secara berkelanjutan melalui evaluasi berkala terhadap efektivitas *Program Edukasi Parlemen*, sebagaimana juga disarankan dalam prinsip *Excellence Theory*.

Secara konseptual, implementasi *Program Edukasi Parlemen* juga berfungsi sebagai bentuk komunikasi partisipatif yang mampu memperkuat legitimasi lembaga. Hal ini sesuai dengan gagasan (Amanda, 2020) yang menekankan bahwa komunikasi publik berperan penting dalam membangun keterlibatan masyarakat dan menciptakan dampak sosial yang positif. Pendekatan partisipatif yang digunakan Humas DPR RI memperlihatkan bagaimana lembaga legislatif dapat menjalankan fungsi edukatifnya secara lebih inklusif dengan melibatkan publik dalam proses belajar dan dialog politik.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa strategi komunikasi publik berbasis *edutainment* mampu menjadi jembatan efektif antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki citra lembaga, tetapi juga meningkatkan literasi politik publik mengenai sistem dan fungsi parlemen. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa *Boundary Spanning* berfungsi sebagai mekanisme jembatan komunikasi, sementara *Excellence PR Theory* memberikan dasar konseptual bagi integrasi fungsi manajerial dan komunikasi strategis dalam pelaksanaan program edukasi publik oleh lembaga pemerintahan.

Tabel 1. Hubungan Temuan Penelitian dengan Teori Boundary Spanning dan Excellence PR

Aspek	Teori	Temuan Lapangan
Komunikasi dua arah	<i>Boundary Spanning</i> – menciptakan hubungan adaptif antara organisasi dan publik	Humas DPR RI membuka forum tanya jawab dengan peserta dan mempublikasikan kegiatan melalui media sosial.
Manajemen citra lembaga	<i>Excellence PR</i> – fungsi humas sebagai manajerial strategis	<i>Program Edukasi Parlemen</i> meningkatkan pemahaman dan persepsi positif publik terhadap DPR RI.
Strategi komunikasi	<i>Press Agentry</i> dan <i>Two-Way Asymmetrical</i>	Humas DPR RI menggunakan media sosial dan kegiatan tatap muka untuk menarik partisipasi masyarakat serta memperluas jangkauan edukasi.

Sumber: diolah dari hasil penelitian, 2025.

Dari sintesis hasil dan teori pada tabel 1 dapat disimpulkan bahwa Humas DPR RI berhasil mengimplementasikan komunikasi dua arah yang konstruktif dengan publik melalui *Program Edukasi Parlemen*. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penyebaran informasi, tetapi juga pada pembentukan pemahaman, kepercayaan, dan partisipasi publik terhadap lembaga legislatif. Temuan ini memperluas pemahaman teoretis tentang praktik komunikasi publik pemerintah yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada penguatan demokrasi partisipatif di Indonesia.

Simpulan

Pelaksanaan *Program Edukasi Parlemen* oleh Humas DPR RI terbukti menjadi strategi komunikasi publik yang efektif dalam membangun pemahaman dan hubungan positif antara lembaga legislatif dan masyarakat. Melalui pendekatan *edutainment*, program ini berhasil meningkatkan literasi politik publik serta mengubah persepsi negatif terhadap DPR RI menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Humas berperan sebagai penghubung yang mengelola komunikasi

dua arah secara transparan dan adaptif, sehingga pesan lembaga dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Secara konseptual, kegiatan ini menunjukkan penerapan prinsip komunikasi simetris dan partisipatif yang menempatkan publik sebagai mitra dialogis, bukan sekadar penerima informasi. Implementasi tersebut memperlihatkan bagaimana fungsi humas dijalankan secara strategis untuk memperkuat citra lembaga, memperluas keterlibatan publik, serta mendukung nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai tindak lanjut, Humas DPR RI disarankan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program serta memperluas kolaborasi dengan media, akademisi, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan jangkauan edukasi publik. Pemanfaatan media digital juga perlu diperkuat agar pesan lembaga lebih mudah diakses dan relevan bagi generasi muda. Melalui langkah ini, *Program Edukasi Parlemen* diharapkan dapat terus berperan sebagai model komunikasi publik yang membangun kepercayaan dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Daftar Pustaka

- Aji, B. A. (2022). *KOMUNIKASI PUBLIK SEBAGAI MEDIA DALAM MENCEGAH PENYAKIT DBD (STUDI KASUS DI PUSKESMAS MATARAM)*.
- Amanda. (2020). STRATEGI PUBLIC RELATIONS DALAM MENINGKATKAN CITRA PERUSAHAAN. *ADViS Journal of Advertising*, 1(1), 1–135.
<https://doi.org/10.47233/jkomdis.v2i1.280>
- Anthony, G. P. (2021). Citra Pemerintah Kota Surabaya Pasca Surabaya Menjadi Zona Merah COVID-19 Di Mata Masyarakat Surabaya. *Journal -E Komunikasi*, 9, 1–12.
- Ashari, S., & Arsyad, A. W. (2023). Implementasi Cyber Public Relations Dalam Pembentukan Citra Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 4(3), 1770–1787. <https://doi.org/10.35870/jimik.v4i3.411>
- Erlangga, D. (2021). *KEGIATAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH HUMAS PT. SGMW MOTOR INDONESIA (WULING) DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MEMPERTAHANKAN CITRA PERUSAHAAN*.
- Evelina, L. W. (2015). Analisis Isu S (Suku) A (Agama) R (Ras) A (Antar Golongan) di Media Social Indonesia. *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 107–122.
<https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v7i1.426>
- Kriyanto. (2014). *Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal*.
- Lavenia, I. (2022). Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Mensosialisasikan Kehidupan New Normal Di Kota Muaradua. *Repository UIN Raden Intan Lampung*, 1–34.
- Maida, S. T., Pranawukir, I., Ningsih, T. S., Mayasari, S., & Setianti, Y. (2025). Peran Manajemen Public Relations Internal dalam Meningkatkan Kapabilitas Para Komunikator Perubahan. *Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*, 7(2), 211–225.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32509/petanda.v7i2.5299>
- Oktavia, P., Krismasakti, B., & Srisadono, W. (2021). Aktivitas Humas Kota Bengkulu Dalam Mempromosikan Objek Wisata. *Jurnal Cyber PR*, 1(2), 136–148.
<https://doi.org/10.32509/cyberpr.v1i2.2831>
- Rahmadanty, M. (2019). *Fungsi Public Relations Sebagai Fasilitator Komunikasi Menjembatani Hubungan Antara Pemerintah Dan Masyarakat (Studi Kasus : Fenomena Desain Kaum Illuminati Pada Jam Gadang)*.

- Ramadani, T. (2019). Pengelolaan Komunikasi Publik. *Jurnal Good Governance*, 15(1), 10–27.
<https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.42>
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Managemen Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173.
<https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>
- Saputra, N., & Marta, R. F. (2020). Optimalisasi Model Strategi Public Relations Museum Penerangan dalam Membentuk Citra Publik. *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 20–31.
<https://doi.org/10.37715/calathu.v2i1.1257>
- Sekretariat Jenderal DPR RI. (2016). *Tentang Sekretariat Jenderal DPR RI*.
<https://www.dpr.go.id/setjen/tentang>.
- Umanailo, M. C. B. (2019). *Paradigma Konstruktivis*. Alfabeta.